

BAB II

SITUS WEB, RADIKALISME DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. Situs Web (*Website*)

Perkembangan teknologi informasi yang terus maju membuat pola dan paradigma baru dalam interaksi sosial. Interaksi sosial yang saat ini banyak diminati oleh manusia adalah interaksi dalam dunia maya melalui jaringan internet (*interconnection-networking*). Oleh karena itu, internet sekarang sudah menjadi tren baru manusia masa kini. Internet menghubungkan milyaran manusia tanpa batas. Situs internet yang kita buat, menjadi bagian dari yang ditampilkan di internet. Situs menjadi sebuah kebutuhan baru di era digital ini. Setiap orang sudah sangat mudah mengakses internet, baik dalam hp, smartphone, notebook, laptop maupun PC sebagai media.

1. Pengertian Situs Web (*Website*)

Situs internet atau yang biasa disebut situs dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1322) diartikan sebagai: 1) daerah temuan benda-benda purbakala, atau 2) tempat yang tersedia untuk lambang inkripsi, atau tempat pada suatu papan yang tidak dapat dilubangi. Setelah kata situs tersebut mendapat imbuhan web, artinya ialah program komputer yang menjalankan peladen yang menyediakan akses kepada beberapa laman.

Situs Web dalam bahasa Inggris ialah *website*. Kata ini sudah lazim dipahami oleh kebanyakan orang, namun kata tersebut belum resmi diserap ke dalam bahasa Indonesia. Istilah *website* inilah yang akan peneliti gunakan untuk mengistilahkan situs web.

Rahmat (2010: 2) mengartikan *website* atau situs web sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar dia atau bergerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.

Sedangkan Taufik (2014: 5) mengartikan bahwa *website* adalah rangkaian atau sejumlah halaman di internet yang memiliki topik saling terkait untuk mempresentasikan suatu informasi. *Website* merupakan miniatur dan representasi dari perorangan, lembaga, organisasi, ataupun perusahaan yang bersangkutan. *Website* memberikan informasi, gambaran, serta visualisasi orang/lembaga yang bersangkutan. *Website* bisa dibuat dengan tujuan apa saja, tergantung pemilikinya.

2. Sejarah Website

Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy Jhon ‘Tim’ Berners-lee. Sedangkan website yang tersambung dengan jaringan pertama kali muncul pada tahun 1991. Pada awalnya, Tim menciptakan website dengan tujuan untuk mempermudah arus pertukaran dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di CERN, tempat dia bekerja. Pada tanggal 30 April 1993, CERN menginformasikan bahwa WWW dapat digunakan gratis oleh semua orang. (Hernita, 2010: 5)

Website ditulis atau secara dinamik dikonversi menjadi HTML (*Hyper Text Markup Language*) dan diakses melalui sebuah program software yang biasa disebut jaringan web browser. Halaman web dapat dilihat atau diakses melalui jaringan computer dan internet, sedangkan perangkatnya bisa berupa personal computer, laptop, PDA, maupun cell phon.

3. Jenis Website

Berdasarkan jenisnya website (Jonan, 2007: 1) dibagi menjadi dua, yakni website statis dan website dinamis.

a. Website dinamis

Website dinamis, yaitu bahwa website akan bersifat dinamis atau fleksibel. Artinya, website bisa dimanipulasi atau di-*update* datanya ketika website tersebut sedang dalam keadaan online (sedang dalam keadaan terkoneksi di internet). Misalnya, untuk meng-*update* berita, cukup membuka bagian administrator lalu isikan data terbarunya. Dengan begitu berita telah ter-*update*.

b. Website Statis

Website statis, yaitu website yang datanya tidak bisa diubah atau diupdate secara *real time* atau ketika sedang online. Untuk mengubah atau meng-*update* data website statis harus kembali ke bahasa pemrograman. Pada prinsipnya, perbedaan antara keduanya adalah mengenai tingkat kepraktisan dalam pengelolaan website itu sendiri termasuk pengelolaan securitas atau tingkat keamanan website.

4. Contoh Website

Jika membuka internet, maka akan dengan mudah dijumpai beragam contoh website beserta fasilitas dan tampilan yang ditawarkannya. Contoh website yang sering dijumpai di antaranya adalah yang sering kita jumpai adalah:

- a. Website untuk mencari informasi (*search engine*), misalnya: google.com, yahoo.com, dan lain-lain.
- b. Website jejaring sosial (*social media*), misalnya: facebook.com, twitter.com, dan lain-lain.
- c. Website toko online (*online shop*), misalnya: blibli.com, lazada.com, javatylish.com, dan lain-lain.
- d. Website perusahaan (*company profile*), misalnya: pertamina.com, pln.co.id, dan lain-lain.
- e. Website portal berita (*news*), misalnya: detik.com, kapanlagi.com, republika.co.id, dan lain-lain.
- f. Website perorangan (*personal site*), misalnya: iffahmedia.com, dan lain-lain.

B. Radikalisme Agama

Fenomena radikalisme agama sudah menjadi tema-tema diskusi para akademisi pada abad ini. Dengan banyak pendekatan dan perspektif yang beragam, fenomena radikalisme sudah melahirkan banyak hasil penelitian. Sebagaimana disebutkan oleh Umi Sumbulah misalnya, dalam buku “Islam ‘Radikal’ dan Pluralisme Agama” (2010), menyebutkan beberapa penelitian terkait dengan radikalisme. Beberapa penelitian tersebut di antaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Machasin, yang berkesimpulan bahwa akar teologis kekerasan agama antara lain dapat dilihat pada konsep jihad, memerangi orang kafir, dan totalitas Islam, yang banyak dirumuskan era peperangan, namun tidak dibaca secara komprehensif. Kemudian penelitian Ilyas yang menggunakan perspektif normatif, menyatakan bahwa sikap gerakan Islam radikal terhadap agama-agama lain, berbasis pada teologi eksklusif yang dikembangkannya, sebagaimana interpretasi Qutb terhadap al-Qur’an 2: 62 bahwa keimanan yang absah dan menjamin keselamatan hanyalah Islam. Dengan demikian, keimanan Yahudi dan Nasrani telah kehilangan keberlakuannya, pasca kerasulan Muhammad dengan risalah Islamnya. Juga penelitian-penelitian lainnya dengan hasilnya masing-masing yang tidak disebutkan di penelitian ini.

1. Pengertian Radikalisme

Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar, pengkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. (Muslih, 2015: 9) Dalam bahasa Inggris, kata radikal memiliki makna ekstrem, menyeluruh fanatik, revolusioner, fundamental. Sedangkan radikalisme adalah doktrin atau praktek yang mengenui paham radikal. (Widiana, 2012: 12)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme berarti “(1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik. Dalam Kamus Politik, yang dimaksud radikal adalah orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya, dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut. (Roger, 2013: 791)

Berkaitan erat dengan kata radikal sendiri, ada beberapa istilah mengemuka yang seakar dengan kata radikal. Beberapa istilah tersebut di antaranya adalah radikalisme, radikalisasi, dan deradikalisasi. Abu Rokhmad (2014), mengutip pendapat KH. Hasyim Muzadi (Ketua PBNU dan pengasuh pesantren al-Hikam Malang), membedakan antara radikal, radikalisme, dan radikalisasi. Dalam kutipannya, Rokhmad menjelaskan bahwa seseorang berfikir radikal (maksudnya berfikir mendalam, sampai ke akar-akarnya) boleh-boleh saja, dan memang berfikir sudah seharusnya seperti itu. Rokhmad mencontohkan, misalnya, berkaitan dengan permasalahan bangsa Indonesia yang semakin runyam, baik dalam persoalan ekonomi, social, politik dan sebagainya. Atas berbagai persoalan itu, lahir suatu pandangan yang menginginkan sistem pemerintahan Islam ditegakkan di Indonesia sebagai solusinya.

Sedang radikalisme adalah radikal dalam paham atau ismenya. Maksudnya ialah radikal yang sudah menjadi ideologi dan madzhab pemikiran. Sedangkan yang dimaksud radikalisasi, ialah seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi ini tumbuh berkaitan erat dengan ketidakadilan ekonomi, politik, dan lainnya. (Rokhmad, 2012: 83). Dalam bahasa Randy (2011: 9), *Radicalization is used to refer to the process of developing extremist ideologie and beliefs.*

Dari pengertian-pengertian di atas, definisi radikalisme cenderung berkonotasi negatif. Namun ada pula yang mendefinisikan radikalisme dalam makna positif, yakni Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry dalam Kamus Ilmiah Populernya (1994) menjelaskan bahwa radikalisme ialah paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan.

Afif Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Muslih (2015: 80), mengatakan bahwa predikat radikal bisa dikenakan pada tataran pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah ‘pemikiran yang radikal’ dan bisa pula ‘gerakan’. Atas dasar itu, radikalisme dapat dipahami dalam dua dimensi yang berbeda, yakni dimensi pemikiran dan dimensi tindakan. Dalam dimensi pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk dimensi tindakan atau *action*, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama.

Pada ranah politik, lanjut Muslih, radikalisme terlihat pada adanya tindakan memaksakan pendapat dengan cara inkonstitusional, misalnya tindakan mobilisasi massa untuk kepentingan tertentu yang berujung konflik. Sedangkan pada ranah agama, radikalisme terlihat dari tindakan-tindakan anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain atau kelompok seagama yang berbeda dan dianggap sesat.

Banyaknya fenomena radikalisme yang terjadi pada ranah nomor dua tersebut kemudian melahirkan istilah radikalisme agama. Menurut Tarmizi Taher sebagaimana dikutip oleh Ali Mubezakir (2007: 228) dalam makalahnya “Kelompok Islam Radikal di Indonesia: Prospek dan Solusinya” menjelaskan bahwa yang dimaksud radikalisme agama ialah gerakan dari kelompok Muslim tertentu yang menolak tatanan yang sudah ada, terutama yang dinilai berasal dari Barat, dan berusaha menerapkan suatu model tatanan tertentu tersendiri yang berbasiskan nilai-nilai ajaran Islam fundamental, yakni al-Qur’an, Hadist, dan praktik kehidupan sahabat Nabi generasi pertama.

Dalam pengertian lain, Muhammad (2015) menyebut radikal sering juga dimaknai fundamental. Dengan kata lain, jika menyebut radikalisme agama, maka identik dengan fundamentalisme agama. Selain itu pengertian lain yang identik dengan kata radikalisme

adalah fanatisme, ekstrimisme, militanisme, revivalisme, dan lain-lain. kata radikal juga sepadan dengan kata liberal, reaksioner, progresif, dan lain-lain.

Kelompok ini disebut radikal dapat diketahui melalui prinsip-prinsip yang dimilikinya. Para penganjur radikalisme Islam meletakkan prinsip-prinsip pokok tertentu sebagai kerangka ideologis kebangkitan Islam. Menurut Imadudin Rahmat (2005: 14) yang meminjam pendapat Hrair Dekmejian, prinsip-prinsip tersebut adalah: *Pertama, din wa daulah*. Kelompok ini menganggap, Islam merupakan sistem kehidupan yang total, yang secara total dapat diterapkan pada semua keadaan, tempat dan waktu. Pemisahan antara agama (*din*) dan negara (*daulah*) tidak dikenal dalam Islam. Hukum syar'ah dalam Islam bersifat *inheren* (yang melekat). Alqur'an memberikan syari'ah dan negara menegakkannya.

Kedua, fondasi Islam adalah al-Qur'an dan Sunah Nabi dan tradisi para sahabatnya. Umat Islam diperintahkan untuk kembali kepada akar-akar Islam yang awal dan praktek-praktek Nabi yang puritan. Bagi kelompok ini, teks ditempatkan pada posisi sentral yang senantiasa rujukan utama bagi perilaku keagamaan, bahkan teks sebagai hakim bagi problematika yang dihadapi. Teks dianggap memiliki otoritas untuk mengadili realitas kehidupan (Sumbulah, 2009: 40). Bahkan teks dianggap memiliki kememadain untuk menjadi rujukan atas problem-problem kehidupan.

Tawaran konsep ideal Islam didasarkan kepada sumber-sumber keagamaan otoritatif, berupa al-Qur'an dan Hadis, yang pemahaman dan praktik keagamaannya telah diteladankan oleh Rasulullah dan generasi *salaf al-shālihīn* (Sumbulah, 2009: 2). Oleh sebab itu, seluruh masyarakat maupun penguasa yang tidak mempraktekkan Islam sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin adalah kafir. Masyarakat yang demikian boleh diperangi agar kembali kepada Islam yang benar.

Kelompok ini menganggap perkembangan Islam merupakan kemusyrikan, dan bahwa seluruh pemerintahan dan institusinya yang tidak menerapkan syari'at Islam adalah bagian dari kejahiliyahan yang harus dihancurkan dan digantikan dengan masyarakat muslim yang benar. Jahiliah adalah istilah al-Qur'an untuk menyatakan kebodohan, kekerasan, kekejaman, dan kepentingan diri yang ada sebelum turunnya al-Qur'an, yang bagi kaum radikal, menghalangi terwujudnya secara penuh komunitas

Islam. Kaum ini menilai bahwa organisasi negara adalah jahiliyah karena tidak memerintah berdasarkan prinsip Islam seperti dipahami. (Sarbini, 2005: 16)

Ketiga, puritanisme dan keadilan sosial. Umat Islam diminta untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan. Umat Islam wajib membentengi diri dari budaya asing. Hal lain yang penting untuk dilakukan ialah menegakkan keadilan sosial-ekonomi. Dengan ini maka konsekuensinya adalah meninggalkan sistem riba, serta memutus ketergantungan dengan Barat dan kroni-kroninya.

Keempat, kedaulatan dan hukum Allah berdasarkan syari'at. Tujuan utama manusia ialah menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi. Hal ini hanya dapat ditegakkan jika menerapkan syari'ah sebagai undang-undang tertinggi. Karena itu, gerakan ini bercorak konfrontatif terhadap sistem sosial dan politik yang ada. Gerakan ini menghendaki perubahan mendasar terhadap ideologi yang ada saat ini, sebagaimana yang diungkapkan pada poin sebelumnya, yang disebut ideologi sekuler atau jahiliyah *modern*, dan kemudian menggantinya dengan ideologi yang mereka anggap sangat memadai, yaitu ideologi Islam. (Rahmat, 2005: 11)

Kelima, jihad sebagai pilar utama menuju nizam Islam, untuk mewujudkan tatanan Islami, diperlukan upaya sungguh-sungguh. Sebab untuk menghancurkan tatanan jahiliyah dan menakhlukan kekuasaan-kekuasaan duniawi yang telah ada diperlukan jihad perang suci. Tujuan jihad adalah menakhlukan semua halangan yang mungkin akan menghambat penyiaran Islam ke seluruh dunia, apakah halangan itu berupa negara, ideologi sosial, dan tradisi-tradisi asing. Jihad harus dilakukan secara komprehensif, termasuk dengan cara kekerasan.

Bagi kelompok ini, Barat adalah setan besar. Barat yang lazim didefinisikan oleh kelompok ini adalah Amerika dan para anteknya. Kelompok ini menganggap bahwa Amerika dan sekutu-sekutunya ialah musuh Islam. Amerika dan para anteknya dianggap biang keladi terhadap segala permasalahan dan kehancuran umat Islam. Selain itu juga dinilai yang telah memecah belah dunia muslim, pendukung kebijakan zionisme Israel yang meluluhlantakkan kemanusiaan di bumi Palestina yang telah dihuni oleh etnis Arab-Muslim Palestina. Karena itu, Bombing dan terorisme merupakan ekspresi keagamaan kelompok ini sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap kelompok yang mereka definisikan sebagai "musuh". Perilaku kekerasan yang dilakukan kelompok ini diyakini

sebagai jihad *fi sabīli allāh* melawan teroris, yakni Amerika dan sekutunya. (Sumbulah, 2009: 45)

Prinsip-prinsip itulah seperti itulah yang kemudian dijadikan ideologi oleh kelompok ini dalam menjalankan segala aktivitasnya. Sebagaimana dijelaskan McClosky bahwa ideologi ialah sebagai *systems of belief of power that are elaborate, integrated, and coheren, that justify the exercise of power, explain and judge historical events, identify political right and wrong, set forth the interconnections (causal and moral) between politics and other sphere of activity, and furnish guides for action*. (Khoshkish, 1979: 90)

Dengan demikian ideologi tidak sebatas gagasan, melainkan gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok manusia, yang sifatnya menggerakkan manusia tersebut untuk merealisasikan gagasan tersebut (Sarhini, 2005: 43). Karena itu ideologi sesungguhnya tidak hanya keyakinan tentang yang diinginkan atau dimaksudkan menuntun tindakan, namun juga memiliki legitimasi atau justifikasi terhadap sebab-sebab sebuah tindakan dilakukan. Oleh sebab itu ketika kelompok radikal menghubungkan perilakunya dengan pandangan hidup, pandangan agama, atau paradigma sosial yang ditegakkan sebagai sebuah ideologi, maka ekspresi tindakan kekerasan yang dilakukan diharapkan lebih memungkinkan untuk bisa dipahami oleh pihak lain. (Sumbulah, 2009: 43)

Ideologi inilah yang kemudian menjadi sumber inspirasi dan spirit bagi hampir seluruh gerakan fundamentalis Islam. Ideologi jihad dipahami sebagai legitimasi atas tindakan kekerasan. Jihad diyakini sebagai berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan membunuh kaum Muslim. Oleh sebab karakteristik ideologi juga mengandaikan kecenderungan intoleran terhadap cara-cara berfikir atau epistemologi berfikir lain, maka pada saat kelompok tersebut mengasumsikan suatu “musuh”, berarti ia memiliki parameter tersendiri untuk mendefinisikannya. (Sumbulah, 2009: 43).

2. Latar Belakang Radikalisme

Radikalisme lahir tidak pada ruang hampa, tetapi lahir karena ada suatu alasan tertentu. Para ahli mengemukakan alasan tersebut dengan varian penekanan. Djamhari Makruf (2007: 9) menjelaskan bahwa gerakan Islam garis keras ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang berbeda. Faktor-Faktor tersebut di antaranya ialah, *pertama*, faktor politik. Adanya keterpinggiran dan ketidakpuasan politik menjadi alasan utama pemicu

lahirnya gerakan ini. Menurut Makruf, agama pada tahap awal bukanlah pemicunya. Namun demikian ketika kelompok sudah terbentuk, agama menjadi faktor legitimasi maupun perekam yang sangat penting.

Kedua, isu solidaritas terhadap penderitaan umat Islam di belahan bumi lain. Misal ialah isu Palestina-Israel. Sentimen ketidakadilan atas sikap dunia Barat terhadap perilaku Israel terhadap Palestina yang tidak seimbang dengan sikap dan tanggapan yang kekras terhadap Irak, menjadi faktor yang penting untuk disuarakan umat Islam. Terlebih lagi munculnya Imam Khomeini dalam revolusi Islam Iran yang dinilai oleh umat Islam sebagai lambang perlawanan kaum Muslim tertindas untuk melawan penindasnya, ini kemudian menjadi dorongan yang kuat untuk melaksanakan sikap radikal.

Selain dari yang telah disebutkan di atas tersebut, menurut Makruf (2007), faktor yang melatarbelakangi munculnya gerakan Islam garis keras ialah adanya pemahaman agama yang cenderung tekstualis, yakni memahami agama apa adanya yang tertulis dalam teks-teks suci yang skriptual.

Sementara itu Syamsul Bahri sebagaimana dikutip oleh Gunaryo kemudian dikemukakan oleh Hasyim Muhammad (2015: 202), mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong munculnya radikalisme atau kekerasan dalam agama antara lain adalah: 1) pergolakan sosial politik yang melanda dunia Islam; 2) emosi keagamaan dan fanatisme yang melahirkan sentimen keagamaan dan solidaritas sesama kelompok agama; 3) ideologi anti Westernisasi. Westernisasi dianggap telah menggerogoti pengamalan syariat Islam; 4) faktor budaya akibat pengaruh kebudayaan atau tradisi lokal dan sekularisasi yang dibawa oleh Barat; 5) ketidakmampuan pemerintah Islam menyelesaikan masalah sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi masyarakat; dan 6) propaganda media massa Barat yang cenderung memojokan Islam.

Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan di atas, Muhammad Asfar (2003: 62) dalam “Islam Lunak Islam Radikal” menyederhanakan bahwa ada dua variabel penjelas utama untuk memahami munculnya gerakan-gerakan radikal di kalangan Islam, faktor dari dalam Islam dan faktor dari luar Islam. Faktor dari dalam ini lebih banyak berkaitan dengan penafsiran konsep jihad yang dipahami oleh sebagian penganut Islam. Penganut gerakan-gerakan radikal Islam umumnya didorong oleh pemahaman mereka tentang konsep jihad yang dimaknai sebagai perang lawan non-Islam. Mereka selalu

melihat dunia ini dalam dua kaca mata: *dar al-harb* (negeri non muslim, atau perang) dan *dar al-Islam* (negara Islam). Daerah yang dianggap dar al-harb harus dipandang sebagai sasaran ekspansi dan penundukan. Untuk melakukan ekspansi dan penundukan itu, dengan slogan jihad, tak jarang disertai senjata seperti pedang dan bom.

Sementara gerakan radikalisme yang dipicu oleh faktor dari luar Islam, Asfar (2003: 67) menyebutkan bahwa faktor itu ialah bentuk reaksi terhadap modernisasi yang dilakukan oleh Barat terhadap dunia Islam. Mengutip pendapat Daniel Lerner, Asfar menjelaskan munculnya fundamentalisme di Timur Tengah sebagai reaksi atas modernisasi yang dikenalkan Barat yang dianggap telah mendistorsi otoritas tradisional mereka. Karena sebagai reaksi atas modernisasi, termasuk isme-isme lainnya, ketika isme-isme baru ini gagal menawarkan solusi yang lebih baik maka daya tarik fundamentalisme justru semakin menguat. Bahkan, lanjut Asfar, faktor ekonomi, alam gersang, dan semacamnya menjadi pemicu munculnya ekspresi gerakan fundamentalisme dalam bentuk perang suci dengan menakhlukan wilayah lain.

Lebih lanjut Asfar menjelaskan, makin maraknya berkembang gerakan radikalisme belakangan ini karena didorong oleh kondisi sosial ekonomi yang dianggap tidak adil bagi kaum muslimin. Radikalisme Islam dipahami sebagai reaksi atas perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, seperti adanya 7F perangkap Yahudi yakni *food, film, fashion, free thinkers, financial, faith, and friction*. Selain itu juga adanya konspirasi internasional untuk menghambat perkembangan agama dan gerakan-gerakan Islam, yang melibatkan kekuatan antar Negara yang disponsori oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, adanya ambisi Amerika Serikat untuk menguasai dunia Arab (Islam) yang kaya minyak, mulai “menguasai” penguasa-penguasa Arab sampai dengan menginvasi Irak dan mungkin ke negara-negara Arab lainnya dan sebagainya.

Selain adanya faktor dari dalam seperti tentang kekeliruan pemahaman agama dan karena faktor dari luar seperti faktor sosial, ekonomi, politik, dan sejenisnya, ada juga asumsi bahwa radikalisme di Indonesia yang berujung pada aksi teror bom, dilakukan karena keputusan dari pelakunya akibat depresi dan tekanan psikologis.

Para pelaku teror khususnya bom bunuh diri dianggap sebagai orang yang tidak memiliki “masa depan” dan kebahagiaan duniawi, sehingga nekat memilih mengakhiri

hidupnya agar segera dapat meninggalkan dunia dan—menurutnya—segera masuk surga. (Rahman, 2007: 56).

Firdaus Muhammad dkk (2007: 150) mengungkapkan bahwa ada dua tipe gerakan yang mengemuka dalam memperjuangkan ide-ide Islam formalis. *Pertama*, gerakan kelompok tersebut yang memperjuangkan melalui jalur partai politik dan lobi-lobi partai politik formal, seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan lainnya. *Kedua*, kelompok tersebut yang memilih gerakan sosial terlebih dahulu untuk mensosialisasikan ide kulturalnya dan sedikit menampilkan simbol-simbol kekuasaan, seperti Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan lainnya.

Mengutip pendapat Horace M. Kallen, Firdaus (2007: 151) mengemukakan, meskipun terdapat dua tipe sebagaimana disebutkan di atas, namun keduanya memiliki kesamaan ciri. *Pertama*, kelompok tersebut tampil mendakwahkan pentingnya penerapan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) di tengah-tengah zaman modern ini baik dalam bidang sosial maupun politik bahkan urusan domestik pribadi. *Kedua*, kelompok tersebut mendasarkan praktek keagamaannya pada orientasi masa lalu (*salafy*). *Ketiga*, kelompok itu sangat memusuhi Barat dengan segala bentuk peradabannya seperti sekulerisasi dan modernisasi. *Keempat*, perlawanannya dengan gerakan liberalism Islam yang tengah berkembang di Indonesia.

3. Penyebaran Paham Radikalisme

Radikalisme tidak berkembang luas secara serta merta begitu saja, tetapi melalui perantara (medium) yang dipandang cukup strategis dalam rangka penyebarluaskan paham radikalisme. Muslih (2015: 88) mengatakan bahwa para pendukung paham radikalisme menggunakan berbagai sarana dan media untuk penyebarluaskan paham radikalisme. Adapun sarana dan media tersebut di antaranya ialah:

- a. Melalui pengkaderan organisasi. *Pertama*, pengkaderan internal. Ini biasanya dilakukan dalam bentuk *training* calon anggota baru dan pembinaan anggota lama. *Kedua*, *mentoring* agama Islam. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di perguruan tinggi umum dan dimaksudkan sebagai kegiatan pelengkap untuk mengatasi terbatasnya pendidikan agama di ruang kelas. *Ketiga*, pembinaan Rohis SMA/Sederajat. kegiatan siswa yang tergabung dalam Kerohanian Islam (Rohis) juga

bisa menjadi sasaran empuk ideologi radikal. Kegiatan-kegiatan kesiswaan sering disusupi oleh pihak luar yang diundang untuk mengisi kegiatan tersebut.

- b. Melalui masjid-masjid yang berhasil “dikuasai”. Kelompok Islam radikal sangat pandai memanfaatkan masjid yang kurang “diurus” oleh masyarakat sekitar.
- c. Melalui majalah, *bulletin*, dan *booklet*. Penyebaran ideologi radikalisme juga dilakukan melalui majalah, *bulletin* dan *booklet*.
- d. Melalui penerbitan buku-buku. Paham radikalisme juga disebarluaskan melalui buku-buku, baik terjemahan bahasa Arab yang umumnya ditilis oleh para penulis Timur Tengah, maupun tulisan mereka sendiri.
- e. Melalui media internet. Selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan informasi tentang jihad.

Di lain pihak, Muhammad Tholhah Hasan sebagaimana dikutip Mukodi (2015: 93) menilai bahwa munculnya gerakan radikalisme di Indonesia terutama setelah reformasi disebabkan variabel dan pemahaman, peranan media internet, kondisi sosial domestik, dan kontalasi politik internasional.

C. Hubungan Situs Internet dan Radikalisme

Rahmat (2010: 2) menyatakan bahwa *website* atau situs web sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar dia atau bergerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Sedang radikalisme adalah radikal dalam paham atau ismenya. Maksudnya ialah radikal yang sudah menjadi ideologi dan madzhab pemikiran. (Rokhmad, 2012: 83).

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa internet atau situs merupakan salah satu sarana yang dijadikan sebagai alat untuk mengampanyekan radikalisme. Sebagaimana dikemukakan Najahan (2015: 145) bahwa situs radikal ialah situs yang isinya membahas tema-tema yang memiliki kriteria berkeyakinan ideologi tinggi dan fanatik yang diperjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung.

Dengan demikian, yang disebut situs radikal atau suatu situs dianggap bermuatan radikal ialah apabila situs tersebut memuat konten-konten yang berhaluan radikalisme. Inilah yang disebut Taufik (2014: 4) bahwa situs merupakan miniatur dan representasi dari

perorangan, lembaga, organisasi, ataupun perusahaan yang bersangkutan. Situs memberikan informasi, gambaran, serta visualisasi orang/lembaga yang bersangkutan. Situs bisa dibuat dengan tujuan apa saja, tergantung pemiliknya.

Adapun indikator yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu situs disebut radikal ialah indikator yang telah disepakati oleh tim Panel Terorisme, Sara, dan Kebencian, di antaranya ialah:

1. Menyebarkan berita bohong terhadap kelompok tertentu, masih merupakan kategori hijau.
2. Ajakan pada sikap tertentu, provokasi, merupakan kategori kuning;
3. Ajakan pada tindakan tertentu, mobilisasi dana, orang, merupakan kategori merah.

Bahwa situs yang termasuk *emergency* adalah situs yang masuk kategori merah. Dengan demikian apabila suatu situs mengandung unsur-unsur yang demikian tersebut dapat dikategorikan sebagai situs yang bermuatan negatif.

D. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Thomas Dye mengatakan bahwa *public policy as “anything a government chooses to do or not to do”* (Kooij, 2015: 11). Dari definisi Dye tersebut, menurut Subarsono (2013: 2) mengandung makna bahwa: *pertama*, kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. *Kedua*, kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Adapun *output* dari suatu kebijakan publik dapat berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat, seperti: undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan lainnya (Abidin, 2012: 67).

Suatu program atau peraturan hanya akan jadi catatan-catatan *elite*, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu keputusan program kebijakan harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). (Suharno, 2013: 169).

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Tanpa implementasi, suatu

kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. (Abidin, 2012: 148). Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

Budi Winarno (2014: 147) memandang implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, yakni merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Pada sisi yang lain, implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. (Winarno: 148)

Mengemukakan pendapat Van Meter dan Ban Horn, Winarno membatasi implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. (Winarno: 149)

Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn

Berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, ada beberapa model proses implementasi yang dikemukakan oleh para ilmuwan dalam disiplin keilmuan ini yang mengemuka. Dari sekian model proses implementasi yang ada, peneliti memilih menggunakan teori model proses implementasi yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn. Hal tersebut karena keduanya menawarkan suatu model dasar dalam hal

implementasi kebijakan. Model yang ditawarkan mempunyai enam variabel yang saling berkaitan antara kebijakan dan kinerja.

Sebagaimana dikemukakan Winarno (2013: 159), model yang ditawarkan ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Dengan demikian, model ini diharapkan dapat menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu cara yang semena-mena. Adapun variabel-variabel tersebut adalah:

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan secara menyeluruh. Hal itu sekaligus merupakan bukti itu sendiri yang dapat diukur dengan mudah.

Di lain pihak, Van Meter dan Van Horn mengungkapkan pula bahwa dalam banyak kasus ada kesulitan-kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Penyebabnya di antaranya ialah: *pertama*, disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifatnya yang kompleks. *Kedua*, akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Meskipun dalam hal ini, Van Meter dan Van Horn menyatakan pula bahwa kadang pula kekaburan ukuran-ukuran dasar memang sengaja diciptakan pembuat kebijakan agar mendapat tanggapan positif dari orang-orang yang diserahi tanggung jawab implementasi. (Winarno: 158)

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi. Sumber-sumber yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber dana atau perangkat lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang aktif.

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Dalam pelaksanaan tahap-tahap implementasi tentu menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika kualitas sumber daya manusia tersebut nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mensukseskan proses implementasi kebijakan ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Ketika sumber daya manusia berkualitas sudah tersedia, sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan kebijakan publik.

Demikian halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur waktu yang tidak tepat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. (Agustino, 2014: 142).

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan (Winarno: 161). Dengan demikian perlu memberi perhatian besar terhadap ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, komunikasi dengan para pelaksanam dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Hal tersebut agar ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini berguna untuk mendorong pelaksana untuk bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antarpemerintah, ada dua tipe kegiatan pelaksanaan yang penting. *Pertama*, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tinggi dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan. Terutama membantu pejabat-pejabat bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstruktur tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan yang berguna dalam melaksanakan

kebijakan. Selanjutnya atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

4. Karakteristik-karakteristik Badan-badan Pelaksana

Dalam menyatakan karakteristik badan-badan pelaksana, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang dimiliki dengan menjalankan kebijakan (Winarno: 166). Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Disamping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. Berkaitan dengan ini, Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, di antaranya ialah:

- a. Komponen dan ukuran staf suatu badan
 - b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana
 - c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif)
 - d. Vitalitas suatu organisasi
 - e. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
 - f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
- #### 5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik yang Mempengaruhi Yuridiksi atau Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik memiliki efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Untuk tujuan ilustratif, Van Meter dan Van Horn mengusulkan agar para pelaksana kebijakan memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai lingkungan kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi di mana implementasi dilaksanakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya adalah:

- a. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yuridiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil?
 - b. Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
 - c. Apa sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan? Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya.
6. Kecenderungan Para Pelaksana (Implementators)

Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas tanggapan itu. (Winarno: 168).

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum kebijakan maupun ukuran-ukuran dasar kebijakan menjadi salah satu kunci sukses dalam hal implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam hal ketidaksesuaian kognisi, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan. Dengan perkataan lain, pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan suatu kebijakan dengan tepat karena pelaksana menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut, begitu juga sebaliknya. Penolakan tersebut, menurut Van Meter dan Van Horn disebabkan beberapa alasan yang, di antaranya adalah: tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak bersesuaian dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.